

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PENERTIBAN PENGEMIS DALAM PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
KETERTIBAN UMUM**

(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah

Oleh

MUHAMMAD ILHAM BUANA
NPM. 1621020504

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PENERTIBAN PENGEMIS DALAM PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
KETERTIBAN UMUM**

(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah

Oleh

MUHAMMAD ILHAM BUANA
NPM. 1621020504

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Pengemis adalah seseorang yang meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga. Hal yang mendorong seseorang untuk mengemis salah satu faktor penyebabnya dikarenakan mudah dan cepatnya hasil yang didapatkan. Pengemis tidak sesuai dengan Norma kehidupan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah. Sering kita melihat pengemis yang berada di sekitar fasilitas umum Kota Bandar Lampung, bahkan mengemis sudah mereka anggap sebagai profesi yang keberadaannya dianggap mengganggu aktifitas masyarakat sehari-hari, keberadaan mereka dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Dari latar belakang yang penulis jabarkan di atas maka rumusan masalah yang akan di pecahkan yaitu, Bagaimana pelaksanaan penertiban pengemis dalam Perda Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja? dan Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan penertiban pengemis di Kota Bandar Lampung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pengemis dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, Serta untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pengemis di Kota Bandar Lampung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung menggunakan Fiqh Siyasah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*field research*) yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek peneliti. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan penertiban pengemis yang mengacu pada Perda nomor 01 Tahun 2018 oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan optimal karena sanksi yang diberikan kurang tegas dan dapat dilihat dari masih ada saja pengemis yang muncul. 2. Pelaksanaan penertiban pengemis oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung di tinjau dari Fiqh Siyasah menyebutkan bahwa pemerintah seharusnya berlaku adil dalam menertibkan maupun memberikan pembinaan kepada pengemis agar mereka yang sudah ditertibkan maupun diberikan binaan tidak kembali turun kejalan. Hal ini berdasarkan surat An-nisa (4) ayat 58 bahwa pemerintah harus amanah dan dapat berbuat adil terhadap seluruh masyarakat.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Ilham Buana**

NPM : **1621020504**

Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PENERTIBAN PENGEMIS DALAM PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
KETERTIBAN UMUM (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bandar Lampung)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil orisinal penulis, tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali diakui dengan referensi yang dibuat dalam teks. Jika kemudian hari terbukti bukan hasil karya sendiri maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Juni 2020

Saya yang menyatakan.



Muhammad Ilham Buana
NPM. 1621020504



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama

Nama : Muhammad Ilham Buana

NPM : 1621020504

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PENERTIBAN PENGEMIS DALAM PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
KETERTIBAN UMUM (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

NIP. 197408162003122004

Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.

**Mengetahui
Ketua Jurusan**

Frenki, M.Si

NIP. 1980031520090110



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)"** disusun oleh, **Muhammad Ilham Buana, NPM : 1621020504**, program studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**.
Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Selasa / 29 September 2020**

Tim Penguji

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Sekretaris : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I.

Penguji Utama : Marwin, S.H., M.H.

Penguji Pendamping I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji Pendamping II : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khyatuddin, M.H.

196210221993031002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”¹

(QS. An-nisa (4) : 58)



¹ Departemen Agama RI, Terjemahan Al-quran

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang kusayangi:

1. Papah Mamah tercinta Bapak Eka Buana dan Ibu Lusiana, guru terbesar dalam hidup yang tak pernah lelah mendoakan dan memberi dukungan yang tidak terbalaskan nilainya oleh apapun.
2. Kakek Nenekku, Fuad Iba, BA dan Latifah kalian salah satu semangatku dalam keberhasilan ini.
3. Atuk Nyaiku, Iriansyah Busroni Anang, S.E, S.H., M.H. dan Nurhayati motivator dalam hidup yang tak pernah lelah mendukung demi keberhasilanku.
4. Pamanku, Edi Nasapta, S.M yang telah banyak mendukung materil serta moril dalam keberhasilanku.
5. Saudara Kandungku, Elan Ishak Buana, Ahmad Fahtoni Buana dan Amanda Nursuri Buana yang telah mendukung dan menyemangatiku.
6. Kepada Ince Solitri Septiani, S.Farm yang telah membantu, meluangkan waktu, mendengarkan keluh kesah, mendukung, memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, pada tanggal 02 Juli 1996. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara, lahir dari pasangan ayah Eka Buana dan ibu Lusiana.

Riwayat pendidikan penulis, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 6 Sumberejo Kecamatan Kemiling yang selesai pada tahun 2008, Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Budaya Kecamatan Kemiling dan tamat pada tahun 2012, Kemudian pada tahun itu juga melanjutkan di SMA Nusantara Kecamatan Tanjung Karang Timur selesai pada tahun 2015 yang ketiga tingkatan sekolah tersebut diselesaikan di Kota Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah SWT atas Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari perhatian, bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak yang sungguh berarti dan berharga bagi penulis. Dengan rasa tulus ikhlas dan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H, dan Bapak Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I, Pembimbing I dan Pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan

bimbingan, pengarahan dan meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu selama perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi.

Semoga Allah SWT membalas semua amalan dan budi baik yang telah diberikan semua pihak untuk membantu penulis. Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini mungkin upaya penulis masih kurang dari sempurna, baik dari segi ilmiah, tata bahasa maupun penyajiannya. Penulis berharap semoga hasil dari karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Bandar Lampung, 22 Juni 2020
Penulis,

Muhammad Ilham Buana
NPM.1621020504

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang	5
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikansi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori.....	16
1. Fiqh Siyasah.....	16
a. Pengertian Fiqh Siyasah.....	16
b. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah	18
c. Dasar Hukum Fiqh Siyasah	22
d. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tentang Ketentraman dan Ketertiban dalam Masyarakat	25
2. Pengemis	36
a. Pengertian Pengemis.....	36
b. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	38
B. Tinjauan Pustaka.....	41

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.....	45
---	----

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Dalam Menertibkan Pengemis	62
---	----

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penertiban Pengemis Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perda Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	65
B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Penertiban Pengemis Pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas persepsi mengenai skripsi ini, perlu penjelasan makna atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalamnya.

Skripsi ini adalah **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)**. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut :

Tinjauan Fiqh Siyasah. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari).¹ Sedangkan Fiqh Siyasah adalah membicarakan tentang perundang-undangan, yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara lainnya, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara.²

Dari pengertian keduanya, dapat dipahami bahwa tinjauan fiqh siyasah merupakan pandangan yang mengatur tentang perundang-undangan serta hubungan antar warga negara dengan warga negara, lembaga negara, maupun antar lembaga itu sendiri.

1. Pelaksanaan Penertiban Pengemis.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

² Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Siyasah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, h. 25.

Pelaksanaan adalah suatu proses ataupun cara maupun perbuatan melaksanakan.³ Penertiban adalah teratur, menurut aturan dan rapi.⁴. Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tertib sosial pengemis merupakan suatu cara agar seseorang yang meminta-minta dari orang lain dapat mengikuti aturan yang telah diatur guna memperhatikan kepentingan umum.

2. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.

Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.⁶

Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.⁷

Bandar Lampung adalah Ibu Kota Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah daratan seluas +/- 19.722 Ha (197,22 Km²), dengan panjang

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Ibid.* h. 774.

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Ibid.* h. 1331

⁵ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

⁶ Diakses dari

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), pada tanggal 13 februari 2020 pukul 11.25

⁷ Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kota> pada tanggal 13 februari 2020 pukul 11.49

garis pantai sepanjang 27,01 Km, dan perairan kurang lebih seluas +/- 39,82 Km² yang terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran.⁸

Dengan demikian Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung ialah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD untuk mengatur pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi dan memiliki wilayah daratan dan pantai.

3. Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Ketentraman adalah suatu keadaan yang memiliki keamanan maupun ketenangan.⁹

Masyarakat merupakan sekelompok atau perkumpulan manusia dan komunitas yang menjadi wadah pengalaman manusia, juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang memiliki fungsi bersama dalam sebuah perkumpulan di luar aparatur negara (atau lebih sering disebut dengan “masyarakat sipil”).¹⁰

Ketertiban adalah keadaan yang serba teratur. Umum adalah sesuatu hal yang tidak menyangkut khusus melainkan mencakup secara menyeluruh.¹¹

Dengan demikian ketentraman masyarakat dan ketertiban umum ialah suatu keadaan yang tenang dari perkumpulan manusia dengan keadaan serba teratur serta mencakup secara menyeluruh.

⁸ Diakses dari <https://anakotah.blogspot.com/2016/11/profil-kota-bandar-lampung.html> pada tanggal 13 februari 2020 pukul 11.55

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Ibid.* h. 1443

¹⁰ Ken Plummer, *Sosiologi the basics*, penerjemah; Nanang Martono dan Sisworo, Edisi Kesatu, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 24.

¹¹ PT Gramedia Pustaka Utama, *Ibid.* h. 1526.

Berdasarkan pengertian dari keseluruhan istilah di atas maka dapat disimpulkan dan dipahami bahwa yang dimaksud dari judul skripsi Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan penertiban pengemis dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum adalah pandangan yang mengatur hubungan antar warga negara agar terciptanya suatu aturan yang tertib dan tenang dari perkumpulan manusia yang menyalahi aturan demi keadaan serba teratur.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk membahas masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Alasan objektif

Adanya fenomena pengemis yang terjadi di Kota Bandar Lampung walaupun sudah ada larangan mengemis yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada bagian tertib sosial pasal 59.

2. Alasan subjektif

- a. Terdapat objek penelitian dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.
- b. Objek kajian pembahasannya sesuai dengan kesyari'ahan dalam bidang Siyasah Syar'iyyah.

C. Latar Belakang

Mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepadaperorangan atau lembaga. Mengemis itu identik dengan penampilan pakaian serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya.

Hal-hal yang mendorong seseorang untuk mengemis salah satu faktor penyebabnya dikarenakan mudah dan cepatnya hasil yang didapatkan. Cukup dengan mengulurkan tangan kepada anggota masyarakat agar memberikan bantuan atau sumbangan.¹²

Pengemis datang bukan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain, melainkan untuk mengambil bagian harta-harta orang yang bertakwa.¹³

Pengemis tidak sesuai dengan Norma kehidupan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu perlu diadakannya penanggulangan, dalam hal upaya pencegahan timbulnya pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada pengemis agar mampu mencapai taraf hidup yang layak sebagai seorang Warga Negara Indonesia.¹⁴

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan pancasila, Fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen

¹²Almanhaj, "Hukum Meminta-Minta(Mengemis) Menurut Syariat Islam, diakses dari <https://almanhaj.or.id/2981-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-islam.html>, pada tanggal 23 oktober 2019 pukul 22.53.

¹³ Drs. Muhsin M K., S.Ag., M.Sc, *Menyayangi Dhuafa* (Jakarta:Gema Insani Press, 2004), h.88.

¹⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis .

kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Melihat dari fungsinya yang sangat penting tersebut, maka diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat.¹⁵

Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat yang mungkin saja terdapat kekacauan dalam masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum maka perlu dilakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dalam hal penertiban pengemis secara terencana dan terpadu.

Untuk dapat terciptanya suatu kondisi yang sesuai dengan ketentraman dan ketertiban umum dengan baik di daerah, sangat perlu diadakan segala usaha, tindakan, yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum dalam hal penertiban pengemis.

Pengemis dianggap mengganggu ketertiban, keamanan, dan keindahan kota. Padahal, Indonesia yang menganut faham Negara yang menyejahterakan rakyat mestinya bertanggung jawab akan masalah tersebut.

¹⁵Ryaas Rasyid, *Pesentralisasi dan Otonomi Daerah :Otonomi Daerah Latar Belakang dan Masa Depan*, (Jakarta: Lipi Press,2007) h.12.

Sering kita melihat pengemis yang berada di sekitar fasilitas umum Kota Bandar Lampung dan rasanya mengemis sudah mereka anggap sebagai profesi yang keberadaannya dianggap mengganggu aktifitas masyarakat sehari-hari dan sering terlihat di keramaian Kota seperti persimpangan lampu lalu lintas Kota, Trotoar, Pasar bahkan Supermarket, Keberadaan mereka dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk menarik perhatian masyarakat, mereka mempunyai beberapa cara dalam meminta seperti, mewarnai seluruh tubuhnya, berbohong, menggunakan anak dibawah umur dan lain-lain.

Melihat fenomena yang terjadi di Kota Bandar Lampung berkenaan dengan pengemis, Pemerintah Kota melakukan upaya di dalam menangani pengemis melalui sistem penegakan hukum dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah, Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum mereka dituntut untuk memperbaiki sektor yang masih lemah dan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah baik melalui suatu pola yang tepat sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peran Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya dalam pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengangkat judul penelitian **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum”**.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan di fokuskan dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai penertiban pengemis yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum” yang objek utamanya pada Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di Kota Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban pengemis dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
2. Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan penertiban pengemis di Kota Bandar Lampung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pengemis dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pengemis di Kota Bandar Lampung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung menggunakan Fiqh Siyasah.

G. Signifikansi Penelitian

Signifikansi atau manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai upaya perluasan wawasan peraturan Daerah di Kota Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai acuan bagi pengembang tugas penegakkan Peraturan Daerah dan serta dapat di jadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian sendiri menggunakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁶

Menurut Kartini kartono, metode penelitian adalah : “Cara berfikir dan membuat yang di persiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian”.¹⁷

1. Jenis dan Sifat penelitian

Jenis penelitian termasuk jenis penelitian lapangan (*field reaserch*) yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek peneliti.¹⁸

Penelitian ini termasuk sifat penelitian kualitatif menampilkan data penelitian dari kata-kata, analisisnya deskriptif, interperentatif yang mengutamakan uraian kata-kata. Meskipun terdapat data yang terdiri dari angka-angka akan di berikan interprestasi dan analisis dari sisi kualitatif.¹⁹

Adapun lokasi penelitiannya adalah di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dengan objek penelitian yaitu "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis

¹⁶Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VII, (Jakarta : Bumi Aksara,2004) h.24.

¹⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet.VII (Bandung : Mandar Maju, 1996) h.15.

¹⁸Ahmad Anwar ,*Prinsip- prinsip Metodologi research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975). h. 2

¹⁹*Ibid*,h. 3

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018”.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data pokok dalam penelitian yang langsung diperoleh melalui data lapangan. Yakni data yang diperoleh di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung melalui kepala, sekretaris dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penunjang dari data primer yang di peroleh melalui buku-buku dan dokumen maupun lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, Seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.

3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data di lapangan penelitian, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁰

Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati kegiatan mengemis dan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

b. Interview

Interview merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.²¹

Praktiknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pegawai atau pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja (yang bertanggung jawab dalam Pelaksanaan Penertiban Pengemis), dan Pengemis yang berada di Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari menghimpun data yang tertulis.

Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya”.²²

²⁰Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009),h. 58.

²¹Sutrisno Had,*Metode Penelitian*, (Rieneka Cipta, Jakarta, 2006),h. 72

²²*Ibid*, h. 74

4. Populasi dan Sampel

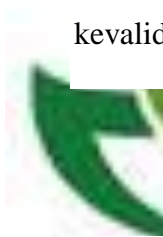
a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi dan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait, yaitu : Pimpinan Kantor Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung (Kepala, Sekretaris atau Kepala bidang), dan Masyarakat.

Pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan karena pihak-pihak tersebut berkompeten di kantor Polisi Pamong Praja guna memenuhi kevalidan penelitian.



5. Metode Pengolahan Data

Metode Pengolahan Data adalah Data yang sudah terkumpul kemudian di olah. Pengolahan pada umumnya dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data yaitu memeriksa data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan masalah.

b. Penandaan data

Penandaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data. Catatan atau tanda dapat di tempatkan dalam body text. Jika itu buku literature, catatan terdiri dari nama penulis, tahun penerbit dan halaman. Jika itu buku perundang-undangan, catatan terdiri dari nomor pasal, nomor, tahun, judul undang-undang. Jika itu putusan pengadilan, catatan terdiri dari nama pengadilan yang memutus perkara, nomorkode, tahun dan judul putusan. Catatan atau tanda dapat juga di tempatkan di bagian bawah teks yang di sebut catatan kaki (footnote) dengan nomor urut.

c. Rekonstruksi data



Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami dan diinterpretasikan.

d. Sistemasi data

Sistemasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan

hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.²³ Analisis data ini menggunakan analisis deskriptif.

Metode deskriptif adalah suatu bentuk penelitian menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejas-jelasnya tentang apa yang diperoleh lapangan dan menggambarkan relasi yang sebenarnya secara rinci dan tuntas.



²³Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradikma, 2015), h.58.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah *fiqh siyasah* ialah *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk kata *mashdar* dari sebuah tashrifan kata *faqihayafqahu-fiqhan* yang memiliki arti pemahaman yang mendalam juga akurat sehingga mampu memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).

Secara terminologis, *fiqh* lebih didefinisikan sebagai berikut : Ilmu tentang hukum-hukum syara” yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil-dalilnya yang lebih terperinci.²⁴ Kata *fiqh* yang ditambah ”*ya nisbah*”, gunanya ialah untuk menunjukkan suatu jenis.

Secara etimologi, kata *fiqh* berasal dari sebuah kata *fiqhan* yang merupakan mashdar dari kata *fi`il mâdhi faqiha* yang memiliki arti paham.

Kata *fiqh* mempunyai arti paham atau memahami didukung oleh firman Allah:

²⁴ Mujaer Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik islam*, (Erlangga, 2008), h.2.

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا

رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ ﴿٩١﴾

Artinya : “Mereka berkata: “Hai Syu’aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami.” (QS. Hud: 91).



Dalam Alquran, makna fiqh sebenarnya lebih dekat kepada makna ilmu, sebagaimana firman Allah:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ

طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ

يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya : “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (Q.S. At-Taubah (9) : 122).

Dari ayat di atas, tampak jelas bahwasannya pengertian dari *fiqh* di sini lebih mengarah pada suatu ilmu pengetahuan agama yang memiliki sifat secara umum meliputi berbagai aspeknya. Sementara dalam kajian *ushûl al-fiqh*, *fiqh* dimaknai dengan ”pengetahuan tentang hukum-hukum *syara*” yang sifatnya amaliah yang digali dari dalil-dalil yang lebih rinci rinci.”

Pengertian ini menunjukkan bahwasahnya *fiqh* adalah hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan para ulama lewat kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung di dalam Alquran dan Sunnah.²⁵

Terdapat istilah lain dari *fiqh siyasah* yang dikenal dengan ilmu tata negara Islam atau ilmu tata negara dalam ilmu Agama Islam. Mengenai asal kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al- Arab* memiliki mengatur, mengurus, serta memerintah.

²⁵ Toha Andiko, *Pemberdayaan Qaw”aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, Jurnal Al-Adalah, Vol. 12, No. 1, 2014

Siyasah bisa juga bisa berarti pemerintahan dan politk, atau membuat kebijaksanaan. Secara terminologis dalam *Lisan al-Arab*, *siyasah* ialah mengatur atau memimpin sesuatu melalui cara yang membawa pada kemaslahatan.

b. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah

Menurut imam al-mawardi, seperti yang dituangkan berdasarkan karangan fiqh siyasah nya yaitu Al-ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut :²⁶

- 1) Siyasah Dusturiyyah
- 2) Siyasah Maliyyah
- 3) Siyasah Qadla 'Iyyah
- 4) Siyasah Harbiyyah
- 5) Siyasah Iddariyyah

Menurut Ibn Taimiyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada surat An-Nisa Ayat 58 dan 59 yakni :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



²⁶ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: dar al-Kutb al-Alamiyyah, 2006), Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 13.

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS.An-nisa (4) : 58).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS.An-nisa (4) : 59).

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil.

Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.²⁷

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembidangan yang telah selesai”. Pembidangan *fiqh siyasah* telah selesai, dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*.

Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menurut pengaturan *siyasah*, dibedakan :

Fiqh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.

Fiqh siyasah dauliyyah, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.

Fiqh siyasah maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.²⁸

²⁷ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyat fi islah al Ra'iyat, dar Al-Kutub al Arabiyat*, Beirut, 1996, h. 4.

²⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007) h. 30.

Siyasah Dusturiyyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah itu sendiri serta dusturiyyah.

Arti Siyasah dapat kita lihat di pembahasan diatas, sedangkan Dusturiyyah ialah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum Siyasah Dusturiyyah adalah keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.

Siyasah Dusturiyyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya, hal ini berarti dapat disimpulkan Siyasah Dusturiyyah adalah kajian terpenting dalam suatu Negara. Karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.

Dengan demikian rambu-rambu *fiqh siyasah* adalah dalil-dalil *kuilli*, baik yang terdapat dalam al-qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW, *maqashid al-syari'ah* dan kaidah-kaidah *Ushul Fiqh* serta cabang-cabangnya.²⁹

Dalam kajian ilmu-ilmu keislaman, fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasanya cukup banyak menarik perhatian para ulama. Ini karena masalah politik merupakan masalah yang terkait dengan kekuasaan dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.³⁰

²⁹ *Ibid. h. 31.*

³⁰ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah- Masalah Fiqh Siyasah Modern", *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014.

Oleh karena itu, *fiqh siyasah* dalam bekeaan dengan pola hubungan antar manusia yang menurut pengaturan siyasah yaitu *Fiqh Dusturiyyah*, *Fiqh Dauliyyah*, dan *Fiqh Maliyyah* sangat penting karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara termasuk dalam mengatur keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya sehingga pemerintahan negara dan masyarakatnya berjalan sangat baik.

c. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Pada penjelasan dari *Fiqh Siyasah* sudah bisa memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber *Fiqh Siyasah*, yang mana *fiqh siyasah* bersumber dari nash-nash Al-Quran dan juga hadits, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam.

1. Al-Quran

Al-Qur'an sebagai Kalam Allah Swt. yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw.

Dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.³¹

Allah Swt. Berfirman :

³¹ H.Ahmad Sanusi, Sohari *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.15.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ

تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa (4) : 59).

Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sunnatu‘l-Lah telah menetapkan, bahwasahnya di antara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syari‘at Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati mereka.³²

³² Ahmad Musthafa Al-Marahi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jus V*, Penerjemah: Bahrn Abu Bakar, Hery Aly, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), h.119.

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan didalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.

Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalikanlah pada Al-Qur'an dan juga Hadis, namun jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan juga hari akhir, sebab orang mu'min tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi.

Disini pun terdapat banyak isyarat bahwa orang yang lebih mengutamakan hawa nafsu juga keuntungan-keuntungan lain daripada mengikuti Al-Quran dan Hadis, maka bukan termasuk dari bagian orang mu'min yang sebenarnya.

Pengembalian sesuatu kepada Allah juga Rasul-Nya itu lebih baik bagi kalian, sebab hal itu memang merupakan asas yang lebih kokoh.³³

Dalam *fiqh Siyasah*, *Amar ma'ruf nahi mungkar* serta kontrol sosial yang berlandaskan agama sangat diperlukan supaya bisa mencegah yang

³³ *Ibid.* h. 121.

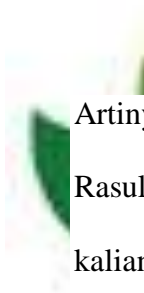
salah serta dapat memilih yang benar serta membuang yang salah bila disadari atau tidak.

2. Al-Sunnah

Selain Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam *fiqh siyasah* ada pula sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah: Hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan.³⁴ Adapun dasarnya, dinyatakan oleh Rasulullah SAW :

ب: عَنْهَا نَحْوُ ضَبْعٍ دُبُكْتَبَةِ الْوَسْطِ نَتَفَهَرْتُ فَبَحْتَهُرُ دَاعَاءَ بَرَزَةِ ضَهَائِلُ الْعَقْلِ

سُؤَالُ الصَّهْبَاءِ الْعَهْوَسَةِ



Artinya : “Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu, iaberkata. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihiwasallam Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di Telaga (di Surga).” (HR.al-Baihaqy).

d. Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tentang Ketentraman dan Ketertiban Dalam Masyarakat

Dikalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Didalamnya terdapat sistem politik dan

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 1993). h. 47.

ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Misalnya Rasyid Rida, Hasan Al-Banna dan Al-Maududi meyakini bahwa “Islam adalah agama yang serba lengkap”.

Didalam ajarannya antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam.

Secara bahasa Fiqh berasal dari *faqaha-yafqaha-yafqafu-fiqhan*, yang berarti “paham yang mendalam” fiqh sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari para ulama (mutjahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ untuk dapat di amalkan oleh umat Islam.

Fiqh mencakup seluruh aspek kehidupan, baik mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), dan mencakup hubungan antara sesama manusia luas (Muamalah).

Sedangkan kata “Siyasah berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasah* yang memiliki arti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian siyasah secara etimologis : “Siyasah berarti suatu tindakan yang dapat mengatur rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menerapkannya dan Allah tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.”³⁵

³⁵ *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Ibid. h.9.*

Metode kajian Fiqh Siyasah atau siyasah syar'iyah tidak jauh beda dengan metode mempelajari fiqh yaitu ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh, yaitu : qiyas, istihsan, 'urf, masalah mursalah, istinbad.

Dengan metode ini, umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi, kondisi yang dihadapi. Fiqh Siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Bahasa ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara : meliputi bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan warisan, peradilan, kriminal, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum internasional. Fiqh Siyasah adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan pemerintahan.³⁶

Upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, pendekatan yang dilakukan adalah masalah mursalah, karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Qur'an dalam batas-batas tertentu, hanya memaktubkan tata nilai. Demikian pada As-

³⁶ Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet 5 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h.27.

Sunnah. Sebagai contoh, Nabi tidak menetapkan peraturan rinci mengenai prosedur pengertian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat, dikemukakan beberapa Firman Allah dan Sabda Nabi yang dianggap berkaitan dengan ikhwal *fiqh siyasah syar'iyah*, baik langsung maupun tidak langsung.³⁷

- 1) Kedudukan Manusia di atas Bumi.
- 2) Prinsip Kekuasaan.
- 3) Prinsip menegakan kepastian Hukum dan Keadilan.
- 4) Prinsip Musyawarah
- 5) Prinsip Kepemimpinan
- 6) Prinsip Persatuan dan Persaudaraan.
- 7) Prinsip Perdamaian.
- 8) Prinsip amar ma'rufnahy munkar.
- 9) Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintahan.
- 10) Prinsip penegakan HAM
- 11) Prinsip Hak Asasi :
 - a) Hak untuk hidup
 - b) Hak asasi milik pribadi dan mencari nafkah
 - c) Hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi
 - d) Hak Berpendapat dan Berserikat

³⁷ *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Ibid. h.3.*

- e) Hak Kebebasan beragama, toleransi agama dan hubungan antar pemeluk Agama
- f) Hak persamaan didepan hukum dan membela diri
- g) Hak kebebasan dari penganiayaan
- h) Hak kebebasan dari rasa takut
- i) Prinsip Amal Makrif dan Nahi Munkar
- j) Prinsip dalam menetapkan para pejabat atau pelaksanaan suatu urusan

Beberapa pendapat di atas, setidaknya dapat di simpulkan bahwa prinsip-prinsip monokrasi islam sebagai berikut :

- a. Prinsip kedudukan manusia di bumi



Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan-Nya adalah sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi ini. Karenanya, manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memeliharanya dari kehancuran.³⁸

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2014), h.233.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۖ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ

یُفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" "Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"(QS. Al-Baqarah : 30).

b. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.

Allah memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya. Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya.

Karena itu, Islam tidak dapat mentoleransi segala bentuk penimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.³⁹

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa : 58).

c. Prinsip penegakan keadilan

Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menegaskan hal ini, Allah tidak hanya menggunakan kata al-wazn/al-mizan, al-qisth, dan as-wasath. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip berimbang dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun akan mengalami goncangan. Diantara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakan keadilan adalah surat sebagai berikut.

³⁹ *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Ibid. h. 234*

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّرًا أَوْ تَعْْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS.An-Nisa : 135).



Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan antara sesama manusia. Islam tidak dapat membedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah.⁴⁰

d. Prinsip musyawarah

Musyawarah disebutkan secara tegas dalam Al-Quran, yaitu

⁴⁰ *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Ibid. h. 235.*

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali ‘Imran : 159).

Ayat tersebut dijelaskan bahwa musyawarah memegang peran penting dalam pengambilan keputusan urusan umat beriman.

Bahkan isyarat pentingnya musyawarah ini diapit oleh penjelasan Al-Qur'an tentang orang mendirikan Shalat dan menafkahkan sebagian hartanya sebagai orang yang mematuhi seruan Allah. Ini menandakan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam nomokrasi Islam yang potensinya hanya setingkat dibawah kewajiban shalat.⁴¹

e. Prinsip kepatuhan terhadap pemimpin

Dalam hal ini Allah meletakkan kewajiban mematuhi-Nya dan Rasul-Nya. Namun demikian, kepatuhan kepada pemimpin bersifat

⁴¹ *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Ibid. h. 236*

relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.⁴²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.An-Nisa :59).

Allah memerintahkan umat islam untuk berpegang teguh pada Agama-Nya dan melarang berpecah-belah, karena persatuan merupakan nikmat yang besar yang telah dianugerahkan Allah kepada Hamba-hambaNya yang beriman.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا

⁴² *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Ibid. h. 237.*

حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ



Artinya : Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Ali 'Imran : 103).

f. Prinsip perdamaian

Islam adalah Agama yang membawa perdamaian dan rahmat. Karena itu, Al-Qur'an mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam hubungan dengan umat lain.

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ



Artinya : Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Anfal : 61).

Dalam hal ini islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Ali 'Imran : 110).

Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukan sesuatu yang tabu dalam demokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu merasa diawasi dan dikontrol. Oposisi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam.⁴³

g. Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintahan.

Dalam prinsip ini, pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan primordial atau kekerabatan.

⁴³ *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Ibid. h. 238.*

Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalitas dan kemampuan kejujuran pejabat negara yang akan diangkat.⁴⁴

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan,

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS.Al-Qasas : 26).

Melalui kisah Nabi Musa a.s Allah mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai “pejabat” harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya) dan terpercaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya).

h. Prinsip penegakan HAM

Prinsip nomokrasi Islam dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu,

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

⁴⁴ *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Ibid. h. 239.*

الْأَناسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS.Al-Maidah : 32).

Penegakan HAM ini bukan hanya terhadap orang-orang Islam saja, melainkan juga terhadap orang-orang non-Islam. Salah satu hak asasi manusia yang paling asasi adalah hak untuk memeluk dan menganut suatu Agama.⁴⁵

2. Pengemis

a. Pengertian Pengemis

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Sedangkan gelandangan

⁴⁵ *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Ibid. h. 240.*

pengemis adalah seseorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis.

Pengemis kebanyakan adalah orang-orang yang hidup mengelandang. Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap.

Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal.⁴⁶

Pengemis adalah salah satu kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan, dan di sisi lain memiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Mereka hidup terkonsentrasi di sentra-sentra kumuh di perkotaan. Sebagai kelompok marginal, pengemis tidak jauh dari berbagai stigma yang melekat pada masyarakat sekitarnya. Stigma ini mendeskripsikan pengemis dengan citra yang negatif.

Pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti kotor, sumber kriminal, tanpa norma, tidak dapat dipercaya, tidak teratur, penipu, pencuri

⁴⁶ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 29.

kecil-kecilan, malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat.⁴⁷

**b. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018
Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum**

- 1) Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Bandar Lampung yang baik, tertib, tentram, nyaman, sejahtera, bersih dan berwawasan lingkungan dengan tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor jasa, pertanian, peternakan, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya sebagai cermin kehidupan masyarakat yang cerdas, modern dan religious.
- 2) Bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan

⁴⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 12.

dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali.

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dan Walikota Bandar Lampung menetapkan Peraturan Daerah Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, adapun beberapa ketentuan umum sebagai berikut yaitu :

- a) Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
- b) Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c) Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
- d) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
- e) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Linmas adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan fungsi penegakan Perda serta

penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

- f) Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tenteram, tertib, dan teratur. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- g) Setiap orang adalah orang perseorang maupun badan sebagai subjek hukum penganggungjawab hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah ini.
- h) Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
- i) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- j) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tugas Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam pasal 6 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja. Melaporkan kepada kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan atau peraturan kepala daerah. Kemudian di dalam bagian tertib sosial pasal 59 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan mengemis dan Perda ini memiliki ketentuan pidana dalam pasal 77 menyebutkan setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B. Tinjauan Pustaka

Penulis menyadari bahwa penelitian ini sama sekali tidak baru. Pada tinjauan pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevansi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Perda Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)”.

Adapun beberapa karya lain yang pernah ditulis oleh penulis lain yaitu sebagai berikut :

Norika Priyantoro dalam skripsi yang ditulis dengan judul “*Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam perspektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No.1 Tahun 2014)*”.

Dalam menyusun skripsinya di gunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif-analitik.

Dan teori yang digunakan adalah public policy dimana kebijakan pemerintah merupakan suatu tindakan yang mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan prinsip yang harus dikedepankan yakni mengembalikan hak-hak dan martabat gepeng yang sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah.

Kemudian penulis menyimpulkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis sudah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang terbukti dengan adanya program desaku menanti berdasarkan Perda No.1 Tahun 2014.⁴⁸

Sandhi Ade Putra dalam skripsi yang ditulis dengan judul “*Pengawasan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Serang*”.

Dalam menyusun skripsinya digunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif.

⁴⁸ Novrika Priyantoro, *Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No.1 Tahun 2014)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2015).

Kemudian hasil dari penelitian skripsi ini adalah menunjukkan bahwa dalam pengawasan belum berjalan baik dan masih terdapat masalah dalam sumber daya manusia, peralatan dalam pengawasan dan kurangnya anggaran.⁴⁹

Nurus Syafa 'Atul Ilmi dalam skripsi yang ditulis dengan judul "*Potret Kehidupan Pengemis Anak di Kecamatan Soko Kabupaten Mojokerto*". Dalam menyusun skripsinya digunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif.

Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah ditemukan bahwa pengemis anak dibagi menjadi dua yakni, faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor internal meliputi ekonomi keluarga, keturunan, dan pendidikan. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan yang ada di masyarakat sekitar.⁵⁰

1. Persamaan dan Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Novrika Priyantoro.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novrika Priyantoro yakni sama-sama meneliti masalah pengemis di dalam Peraturan Daerah dan sama-sama meninjau dari segi perspektif fiqh siyasah.

Perbedaannya terletak pada masalah yang diteliti, Peneliti hanya meneliti pelaksanaan penertiban pengemis dalam Peraturan Daerah

⁴⁹ Sandhi Ade Putra, *Pengawasan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Serang*", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, (Tahun 2018).

⁵⁰ Nurus Syafa 'Atul Ilmi, *Potret Kehidupan Pengemis Anak di Kecamatan Soko Kabupaten Mojokerto*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, (Tahun 2018).

sedangkan Novrika Priyantoro meneliti permasalahan gelandangan dan pengemis.

2. Persamaan dan Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandhi Ade Putra

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandhi Ade Putra ialah sama-sama membahas tentang pengemis yang ada di Kota masing-masing peneliti.

Perbedaannya yakni penelitian terdahulu meneliti pengawasan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial sedangkan peneliti meneliti pelaksanaan penertiban pengemis dalam Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Peneliti menggunakan hukum Islam sedangkan peneliti terdahulu tidak menggunakan hukum Islam.

3. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Nurul Syafa 'Atul Ilmi.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang permasalahan pengemis yang ada di tempat masing-masing peneliti.

Perbedaannya dengan peneliti terdahulu adalah peneliti membahas tentang permasalahan pengemis menggunakan hukum Islam sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori interaksi simbolik dan peneliti menggunakan dasar Peraturan Daerah sedangkan peneliti terdahulu tidak menggunakan dasar Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Anwar ,*Prinsip- prinsip Metodologi research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975)
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V*, Penerjemah : Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 1993)
- Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: dar al-Kutb al-Alamiyyah, 2006), Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Siyasah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009)
- H.Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)
- Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyat fi islah al Ra'iyat, dar Al-Kutub al Arabiyat*,Beirut, 1996
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradikma, 2015)
- Ken Plummer, *Sosiologi the basics*, penerjemah; Nanang Martono dan Sisworo, Edisi Kesatu, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet.VII (Bandung : Mandar Maju, 1996)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VII, (Jakarta : Bumi Aksara,2004)

- Muhsin, *Menyayangi Dhuafa* (Jakarta:Gema Insani Press, 2004)
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014)
- Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik islam*, (Erlangga, 2008)
- Ryaas Rasyid, *Pesentralisasi dan Otonomi Daerah :Otonomi Daerah Latar Belakang dan Masa Depannya*, (Jakarta: Lipi Press,2007)
- Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet 5 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sutrisno Had,*Metode Penelitian*, (Rieneka Cipta, Jakarta, 2006)
- Toha Andiko, *Pemberdayaan Qaw"aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, Jurnal Al-Adalah, Vol. 12, No. 1, 2014
- Novrika Priyantoro, *Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah* (Studi Pasal 24 Perda DIY No.1 Tahun 2014), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2015).
- Nurus Syafa 'Atul Ilmi, *Potret Kehidupan Pengemis Anak di Kecamatan Soko Kabupaten Mojokerto*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, (Tahun 2018).
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Pasal 26.
- Rudin, Pengemis, Wawancara dengan penulis, Indomaret Tirtayasa 3, Bandar Lampung 26 Juni 2020

Rian, Pengemis, Wawancara dengan penulis, Jl. Sultan Agung, Bandar Lampung 26 Juni 2020.

Sandhi Ade Putra, *Pengawasan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Serang*’, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, (Tahun 2018)

Sofuan Sepulau Raya, S.H, Wawancara dengan penulis, Kantor Satpol PP, Bandar Lampung 30 April 2020.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), pada tanggal 13 februari 2020 pukul 11.25

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kota> pada tanggal 13 februari 2020 pukul 11.49

<https://anakotah.blogspot.com/2016/11/profil-kota-bandar-lampung.html> pada tanggal 13 februari 2020 pukul 11.55

<https://almanhaj.or.id/2981-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-islam.html>, pada tanggal 23 oktober 2019 pukul 22.53.

